



SALINAN

RISALAH RESMI

Tahun : 2019
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : 15 Juli 2019
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat : Syarkoni Syam/ Wakil Ketua DPRD
Acara : Rapat Raripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2018 dan ranperda lainnya.
Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir : A. 23 dari 12 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. Fraksi Demokrat

4 dari 6 orang Anggota

2. Fraksi Golkar

5 dari 5 orang Anggota

3. Fraksi Hati Nurani

3 dari 4 orang Anggota

4. Fraksi PDI-Perjuangan

1 dari 4 orang Anggota

5. Fraksi PAN

2 dari 3 orang Anggota

6. Fraksi Gerindra

1 dari 3 orang Anggota

7. Fraksi PKS

3 dari 3 orang Anggota

8. Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

3 dari 4 orang Anggota

9. Fraksi Bintang Pembangunan

3 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. M. Marhabi, S. Sos / Fasilitasi Penganggaran
4. Irayana, SH/ Kasubbag persidangan dan Risalah

Turut Hadir

- :1. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
2. Wakil Bupati Bungo
3. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;

4. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
5. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
7. Yth. Para Camat se-Kabupaten Bungo dan Lurah dalam kota Muara Bungo.
8. Hadirin Yang Kami Hormati

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak Syarkoni Syam disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : SYARKONI SYAM / Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo
(Rapat di buka pukul 09.30 Wib)

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi Kita semua.

Sebelum Rapat Paripurna hari ini Saya buka diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan Daftar hadir Anggota Dewan. Kepada Saudari Sekwan dipersilahkan.

.....Sekwan Membacakan Daftar Hadir.....

Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 23 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang LKPJ, berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota. Dengan demikian quorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda lainnya secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

-----Ketukan Palu 3x-----

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk hadir bersama di ruangan ini, melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda (Ranperda) yaitu :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018.
2. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin Ya Robbal Alamin...

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Merujuk pada ketentuan tersebut, sesuai dengan Surat Bupati Bungo Nomor : 900/04-105.6/BPKAD tanggal 14 Juni 2019, dan sesuai Pasal 320 ayat (5) bahwa persetujuan Bersama Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Paripurna yang diselenggarakan saat ini masih dalam jangka waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat...

Selanjutnya marilah kita dengar dan cermati bersama gambaran yang lebih jelas tentang Ranperda Kabupaten Bungo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago yang akan dipaparkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo, kepada Bupati Bungo dipersilahkan.

Bupati Bungo (H. Mashuri, SP,ME) :

Assamualaikum Wr Wb

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo
- Yth. Segenap Anggota Unsur Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan ketua Pengadilan Agama Muara Bungo
- Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Camat dan lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Segenap kepala instansi Vertikal, pimpinan Bank beserta pimpinan BUMN/BUMD dalam Kabupaten Bungo;

Para hadirin dan undangan yang berbahagia,

Mengawali nota pengantar ini Ranperda ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kurnyanya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir di ruangan ini ,dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo dengan agenda sebagai pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018, dan rancangan pedraturan daerah tentang perusahaan umum daerah pancuran telago.

Sudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang bahagia.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurut pasal 31 undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud yakni berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh BPK, yang selanjutnya disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah.

Dalam kaitan itu, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo TA. 2018. Hasil pemeriksaan dimaksud yakni berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dan juga Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo pada tanggal 28 Mei 2019, bertempat di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Alhamdulillah Opini yang diberikan atas pemeriksaan Laporan Keuangan tersebut yakni **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berkaitan dengan hal tersebut, langkah strategis untuk mempertahankan opini WTP telah kita ambil, diawali dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala OPD yang berisi ;

1. Melakukan inventarisasi ulang aset tetap yang berada dalam penguasaan OPD;
2. Melakukan identifikasi aset tetap Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perolehan awal dan melakukan atribusi ke aset induk;
3. Melakukan pendataan, pencatatan, dan legalisasi tanah di bawah jalan;
4. Menuntaskan sertifikasi tanah yang tercatat pada DBMD OPD;
5. Melakukan penertiban pemanfaatan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penagihan dan pembenahan regulasi piutang daerah;

7. Melakukan verifikasi secara mendalam penyusunan RAPBD sesuai dengan klasifikasi belanja;
8. Memperketat pengawasan terhadap kegiatan fisik untuk menghindari kekurangan volumen pekerjaan;
9. Menuntaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan,
10. Melakukan penertiban akun-akun pada LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, kami tegaskan kembali kepada seluruh Kepala OPD agar sungguh-sungguh melaksanakan komitmen tersebut di lingkungan kerja masing-masing, serta berkolaborasi bersama BPKAD Kabupaten Bungo dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo agar perolehan Opini WTP saat ini bisa dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Berkenaan dengan LKPD TA 2018 yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dapat kami informasikan sebagai berikut:

Dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat, bahwa pencapaian target pendapatan daerah sebesar **95,70%** dari anggaran pendapatan sebesar **Rp1,31 Triliun**, dengan realisasi sebesar **Rp1,26 Triliun**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar **Rp19,2 Milyar** yang merupakan akumulasi dari penurunan realisasi PAD sebesar **Rp49,28 Milyar** dan Transfer sebesar **Rp12,92 Milyar**, sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah naik sebesar **Rp42,92 Milyar**. Selanjutnya, apabila ditinjau dari sisi kontribusi, maka realisasi penerimaan dana perimbangan masih sangat dominan dengan kontribusi sebesar **85,84%**, kemudian disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar **10,61%**, sementara itu Lain-lain Pendapatan Yang Sah hanya berkontribusi sebesar **3,55%**.

Pada sisi belanja, secara keseluruhan realisasi belanja masih berada di bawah pagu dana yang ditetapkan, dengan presentase penyerapan anggaran belanja sebesar **91,45%** dengan realisasi sebesar **Rp1,30 Triliun** dari anggaran sebesar **Rp1,42 Triliun**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar **Rp110,32 Milyar** yang merupakan akumulasi dari kenaikan Belanja Operasi sebesar **Rp60,78 Milyar**, Belanja Modal sebesar **Rp47,15 Milyar**, dan Belanja Transfer sebesar **Rp5,33 Milyar**, sementara itu Belanja Tidak Terduga turun sebesar **Rp2,94 Milyar**.

Selanjutnya, melalui berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah berupa optimalisasi pendapatan daerah serta kebijakan pengendalian belanja daerah, maka defisit anggaran yang tercantum dalam Perubahan APBD TA2018 sebesar **Rp104,02 Milyar**, ternyata direalisasikan surplus sebesar **Rp39,02 Milyar**.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan daerah terdapat 2 (dua) komponen yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat, bahwa realisasi penerimaan pembiayaan berupa SiLPA TA 2017 sebesar **Rp113,41 Milyar**. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dapat direalisasikan sebesar **Rp9,66 Milyar** atau **100%** berupa Penyertaan Modal pada Bank Jambi.

Berdasarkan akumulasi realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja, kemudian ditambah dengan realisasi penerimaan pembiayaan serta dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan, maka SiLPA TA 2018 sesuai hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebesar **Rp64,74 Milyar**, meliputi :

1. Kas di Kas Daerah sebesar **Rp54,10 Milyar**;
2. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar **Rp164,51 Juta**;
3. Kas di BLUD RSUD H. Hanafie sebesar **Rp8,31 Milyar**;
4. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas sebesar **Rp1,86 Milyar**; dan
5. Kas di Bendahara Dana BOS sebesar **Rp301,06 juta**.

Angka SiLPA tersebut di atas selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2019.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, SiLPA awal tercatat sebesar **Rp113,69 Milyar**, dan itu telah digunakan dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2018. Posisi per31 Desember 2018, SiLPA akhir tercatat sebesar **Rp64,74 Milyar**.

Berikutnya, dalam Neraca Daerah secara keseluruhan terdapat kenaikan nilai aset daerah selama tahun 2018 sebesar **Rp68,76 Milyar**. Dengan kenaikan tersebut, maka saldo aset daerah kondisi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1,59 Triliun** menjadi **Rp1,66 Triliun** per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini merupakan akumulasi dari seluruh komponen aset yaitu aset lancar turun sebesar **Rp46,82 Milyar**, investasi jangka panjang naik sebesar **Rp15,31 Milyar**, aset tetap naik sebesar **Rp100,36 Milyar**, dan aset lainnya turun sebesar **Rp89,75 Milyar**.

Kemudian, untuk posisi utang/kewajiban Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp16,50 Milyar** yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Dibandingkan dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar **Rp8,81 Milyar**, maka terdapat kenaikan sebesar **Rp7,69 Milyar** atau **87,36%**.

Dengan adanya mutasi aset dan utang tersebut di atas, maka nilai ekuitas (kekayaan bersih) per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp61,07 Milyar** dari saldo periode sebelumnya sebesar **Rp113,93 Milyar**. Dengan demikian, nilai ekuitas (kekayaan bersih) Pemerintah Daerah keadaan per 31 Desember 2018 menjadi **Rp1,65 Triliun**.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Dalam Laporan Operasional, tercatat Pendapatan LO sebesar **Rp1,28 Triliun** dan Beban sebesar **Rp1,25 Triliun**. Berhubung Pendapatan LO lebih besar dari Beban, maka terdapat surplus operasional sebesar **Rp26,51 Milyar**. Sementara itu pada tahun 2018 terjadi Surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar **Rp5,04 Milyar**. Selanjutnya Pos Luar Biasa mencatat sebesar **minus Rp17,10 Juta**. Berdasarkan kondisi tersebut maka surplus bersih adalah sebesar **Rp31,54 Milyar**.

Dalam Laporan Arus Kas tergambar pergerakan kas masuk dan kas keluar. Saldo awal kas per 1 Januari 2018 tercatat sebesar **Rp90,77 Milyar**, dan pada akhir periode per 31 Desember 2018 menjadi **Rp54,10 Milyar**, sehingga terdapat Penurunan kas bersih selama tahun 2018 sebesar **Rp36,66 Milyar** yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun 2018. Saldo akhir kas sebesar **Rp54,10 Milyar** tersebut merupakan saldo kas daerah di Bendahara Umum Daerah pada Bank Jambi.

Laporan berikutnya adalah Laporan Perubahan Ekuitas, tercatat nilai ekuitas awal Pemerintah Daerah keadaan per 1 Januari 2018 sebesar **Rp1,58 Triliun**, selanjutnya ditambah dengan surplus LO sebesar **Rp31,54 Milyar**, dan dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi diantaranya adalah sebesar **Rp29,52 Milyar**. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ekuitas akhir Pemerintah Daerah keadaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp1,65 Triliun**.

Demikianlah gambaran umum mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018. Penjelasan secara rinci untuk setiap komponen Laporan Keuangan dapat dilihat dalam CaLK yang termuat dalam Lampiran VII Rancangan Perda tersebut.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Sehubungan dengan telah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian awal, perlu kami informasikan juga bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut mencakup 4 (empat) hal yakni :

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di dalamnya memuat opini;
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern;
- Termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Keempat Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, beberapa waktu yang lalu telah kita tindaklanjuti pada saat pemutakhiran tindaklanjut di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Selanjutnya, terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Pancuran Telago yang merupakan Penguatan PDAM Pancuran Telago secara Badan Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu disampaikan pula kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, sekiranya dibutuhkan penjelasan dan tambahan informasi berkenaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah ini, dipersilakan untuk mengundang OPD terkait. Seluruh Kepala OPD telah kami instruksikan agar senantiasa siap untuk memberikan penjelasan sehingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk itu, kesamaan pandangan serta kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah merupakan suatu keharusan, untuk melangkah ke depan membangun Kabupaten Bungo yang **Maju** dan **Sejahtera**.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama

Ayam Berkokok di Pagi Hari

Anak Nelayan Balik dari Memukat

Sudah Lama Opini WTP Dinanti-Nanti

Alhamdulillah Tahun Ini Kito Dapat

Dari Bungo ke Rantau Pandan

Pisang Sale Jadi Buah Tangan

Kerjo Samo yang Baik Terus Kito Tingkatkan

Agar Opini WTP Dapat Dipertahankan

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Terima kasih kepada Saudara Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Perda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat...

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima oleh Bupati Bungo pada tanggal 28 Mei 2019 di BPK Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun berkualitas baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama seluruh perangkat daerah dan DPRD yang telah melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan. Namun demikian, Saya mengajak kita semua, meskipun WTP telah kita raih, tetapi kita harus tetap bekerja lebih baik dan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan kita di masa yang akan datang, karena **perjuangan untuk mendapatkan WTP itu**

Bapak-Ibu Hadirin yang kami hormati.

Dengan telah diterima secara resmi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka diminta kepada:

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo untuk segera membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; dan
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo untuk segera membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago.

Demikian beberapa hal penting yang dapat Saya sampaikan, untuk acara selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara.

Pembawa Acara : Penyerahan Nota Pengantar dari Bupati kepada Pimpinan DPRD

Kepada Yth. Bupati dan Wakil Bupati Bungo serta pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang ditentukan

————— *Bupati Menyerahkan Nota Pengantar kepada Pimpinan DPRD* —————

Kepada Yth. Bupati dan Wakil Bupati Bungo serta pimpinan DPRD disilakan kembali ketempat semula

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat...Demikian Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, sebelum acara diskor, atas nama Pimpinan saya mengundang Anggota Dewan serta hadirin untuk hadir kembali diruangan ini pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada Rapat Paripurna selanjutnya dengan agenda Penyampaian kata akhir Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago.

Akhirnya dengan mengucapkan “Ahamdulillah hirobbil’alamin Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi Saya Skor, semoga Allah SWT meridhoi semua niat dan usaha baik bersama.

————— *Ketukan Palu 1x* —————

Sekian dan terima kasih

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo, 15 Juli 2019

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,



SYARKONI SYAM